PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER

UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMMAD ISNAINI YANUARDI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **156113**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 3.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 375.000.000
2. Tanah Seluas 7393 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 9700 m2/300 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 1.250.000.000
5. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 378.600.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT 110 CC SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL GT 125 CC SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS MOBIL PENUMPANG 1,5L 4X2 M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. 42.500.000

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	139.564.593
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	3.935.664.593
III.	HUTANG	Rp.	269.292.132
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.666.372.461

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.